



Penjelasan Walikota Diragukan

14 Jun 2016



AMBON - Seluruh tim bentukan RUPS Bank Maluku melihat langsung pembelian kantor Cabang Maluku di Surabaya. Tim termasuk anggota DPRD Maluku mengaku, lahan dan gedung tersebut istimewa. Kok bisa?

Walikota Ambon Richard Louhenapessy akhirnya penuhi panggilan Pansus DPRD untuk Bank Maluku, Senin, kemarin. Selain, Walikota selaku Ketua Tim Investigasi, juga anggota Tim Bupati Maluku Tenggara, Adreas Rentanubun dan Komisaris Bank Maluku, Izaak Saimima. Ketiganya, bersama Pansus menggelar rapat tertutup yang berlangsung kurang lebih dua jam.

Agenda Pansus memanggil Walikota selaku Ketua Tim Investigasi Bentukan RUPS Bank Maluku ini terkait hasil kajian dua lembaga independen publik Apprasial yang menjadi penilai transaksi pembelian kantor cabang BM di Surabaya, yang saat ini ditangani Kejati Maluku. Terkait kasus ini jaksa telah menetapkan tiga tersangka.

Ketua Pansus BM, Edwin Adrian Huwae mengaku, proses pembelian kantor cabang BM di Surabaya (Jatim) tidak memakai jasa Apprasial untuk menghitung nilai aset BUMD tersebut. "Saat pengadaan kantor cabang BM di Surabaya berjalan tidak ada jasa Apprasial yang digunakan. Itu kita peroleh langsung dari kantor akuntan publik itu," kata Huwae kepada wartawan usai memimpin Rapat Pansus, kemarin.

Menurut Huwae, transaksi pembayaran kantor cabang BM di Surabaya direalisasikan sejak 17 November 2014. "Nah, hasil penghitungan dari Apprasial itu ada pada 2 April 2015. Itu berarti, waktu proses transaksi pembayaran gedung sama sekali tidak melibatkan dua lembaga publik Apprasial," terang Huwae lagi.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Apalagi sambung dia, dari hasil audit dari kantor akuntan publik membuktikan, bila benar pengadaan kantor cabang ini tanpa menggunakan jasa independen untuk menghitung nilai tanah dan bangunan untuk pembukaan kantor cabang di Surabaya.

Yang menarik, kata dia, hasil penghitungan dua lembaga Apparsial ini nilai berbeda dengan hasil audit independen yang dilakukan kantor akuntan publik yang setiap tahun melakukan audit atas PT, BM-Malut.

“Jadi Pansus undang Walikota, karena saat pembelian tanah dan gedung itu, Walikota ditugasi sebagai Ketua Tim Investigasi mendatangi kantor jasa penilai atau kantor akuntan publik milik Toha di Surabaya,” tegasnya.

Menurutnya, ada ketidak kompakkan para pemegang saham dalam proses ini. “Jadi silahkan menilai apakah itu ada unsur pelanggaran atau tidak. Informasi yang disampaikan Walikota tetap Pansus hormati, karena semua punya hak. Nanti dikonfirmasi dengan dokumen-dokumen yang ada,” tegasnya.

Selain itu, Huwae menegaskan, Pansus akan menjadwalkan bertemu Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, pada 14 Juni 2016, mendatang. “Kita akan bertemu Pak Kajati, untuk menyampaikan semua temuan Pansus itu,” tandasnya.

Terpisah, Walikota Richard Louhenapessy kepada sejumlah wartawan menegaskan, secara normatif proses pembelian kantor cabang BM di Surabaya tidak ada masalah. “Tak masalah. Tapi, kita tidak tahu teknis didalamnya. Kita tidak ikut campur,” kata Louhenapessy.

Dia mengaku, selaku ketua tim yang ditunjuk RUPS BM bertugas melihat langsung proses pembelian kantor cabang BM di Surabaya mengaku, seluruh tim dan anggota dewan melihat lokasi kantor cabang yang bermasalah hukum itu sangat istimewa.

“Karena istimewa ada ke Gubernur untuk dibangun Hotel. Selanjutnya baru ada kantor perwakilan dan ada kantor cabang BM. Ini luar biasa. Jadi bukan saya saja. Ada Sekda Ternate, Bupati lainnya semua lihat dan mengkau lokasi yang dibeli Bank Maluku itu,” terangnya.

Soal kewenangan RUPS menilai KJJ TOHA dan KJJ FAST, Louhenapessy mengakui, kompetensi ada di Direksi BM. “Pemegang saham tidak. Itu soal teknis. Teknis itu pemegang saham tidak terlibat disitu. Itu teknis direksi,” sebutnya.

Dia justeru mengaku, rencana pengembangan anak cabang BM masuk rencana bisnis bank. Orang pertama di Kota Ambon ini mengaku, rencana bisnis bank itu selalu ada persetujuan dari OJK. “Karena sudah ada rencana bisnis Gubernur, Bupati, Walikota diminta setuju untuk itu. Padahal, menurut aturan tidak ada persetujuan tidak masalah, karena semua kewenangan direksi. Jadi sudah masuk di rancangan bisnis bank,” paparnya.

Soal proses hukum yang sementara berjalan di Kejati, Louhenapessy tidak komentar panjang lebar. Dia hanya mengaku, itu soal teknis. “Kita tidak tahu menahu,” katanya.

Dia justeru menegaskan, masalah repo saham BM lebih besar keimbang masalah pembelian kantor cabang BM di Surabaya. “Bukan soal Surabaya, tapi paling serius itu Repo Saham. Itu Rp 238 miliar. Jadi uang ada tapi kenyataannya tidak ada uang. Itu yang paling berat. Itu ada uang, tapi tidak ada di kas,” bebarnya.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : KABAR TIMUR

Disebutkan, tahun 2016 ini ini biasanya deviden terbesar setelah BM, adalah Kota Ambon. “Karena kita punya saham nomor dua terbesar di Bank Maluku. Tahun 2015 tidak ada pembagian deviden. Kenapa karena bank mengalami kerugian,” jelasnya.

Selain itu soal rencana digelarnya RUPS BM, Louhenapessy sepertinya tak setuju. Dia mengaku, sesuai AD/ART BM menyebutkan RUPS itu dilaksanakn satu tahun 1 kali. “Kalau ada hal yang urgen bisa dua kali dan tiga kali RUPSL. Sekali RUPS habiskan Rp 400 juta sampai 500 juta sekali RUPS. Hanya sebuah keputusan selalu RUPS. Berapa itu kerugian bank,” tanya dia. **(KTM)**